



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **CHRISTIAN MAIKEL EMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI**
3. NHK : **510834**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.943.628.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , Rp. 1.492.821.000
3. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , Rp. 25.807.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 169.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 18.900.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 119.936.238**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.251.964.738**

III. HUTANG **Rp. 314.942.904**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.937.021.834**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARNE AGNES RATULANGI
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 104225

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	450.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	18.000.000
1. MOBIL, --- MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	24.837.125
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	514.556
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	537.801.681
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	537.801.681

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEVIE SUSANTI NATHALIE LIMPONG**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **694663**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 95.000.000

1. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/20 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.800.000

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.496.757

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 292.296.757

III. HUTANG Rp. 201.010.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 91.286.357

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD MAHSUN ASIDQI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 747555

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	275.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	82.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	64.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	423.000.000
III. HUTANG	Rp.	306.882.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	116.118.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAUQY HIDAYAH
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 810204

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	165.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	13.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 125 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.040.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	50.300.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	229.340.000
III. HUTANG	Rp.	176.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	53.340.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISTIAN ELFIS SUMENDAP
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 993423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 290.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.000.000

1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 419.000.000

III. HUTANG Rp. 67.480.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 351.520.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTUA PINONDANG SIMANGUNSONG**
2. Jabatan : **PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**
3. NHK : **939567**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	110.000.000
1. Tanah Seluas 654 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	3.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	143.500.000

III. HUTANG **Rp.** **380.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **-236.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEDDY PATTISERLIHUN
2. Jabatan : PANITIA/PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 694761

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 802.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 301.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 786 m2/144 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 501.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.400.000

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 103.900.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO 14D AL 115 CC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 132.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 31.600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.073.000.000

III. HUTANG Rp. 62.773.595

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.010.226.405

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Ikhtisar Kepatuhan LHKPN



Penarikan Data per Tanggal : 12/06/2026 02.25.26

LAPORAN

Pelaporan LHKPN Tahun

Jenis Laporan

2025

Periodik

INSTANSI DAN JABATAN

Tingkat

Bidang

Pusat

EKSEKUTIF

Eselon

Status UU

(All)

(All)

Provinsi

--

Nama Instansi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Kerja

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Subunit Kerja

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

Pelaporan

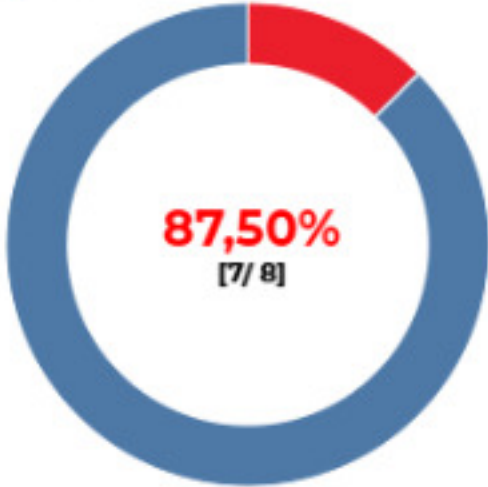


Sudah Lapor

8

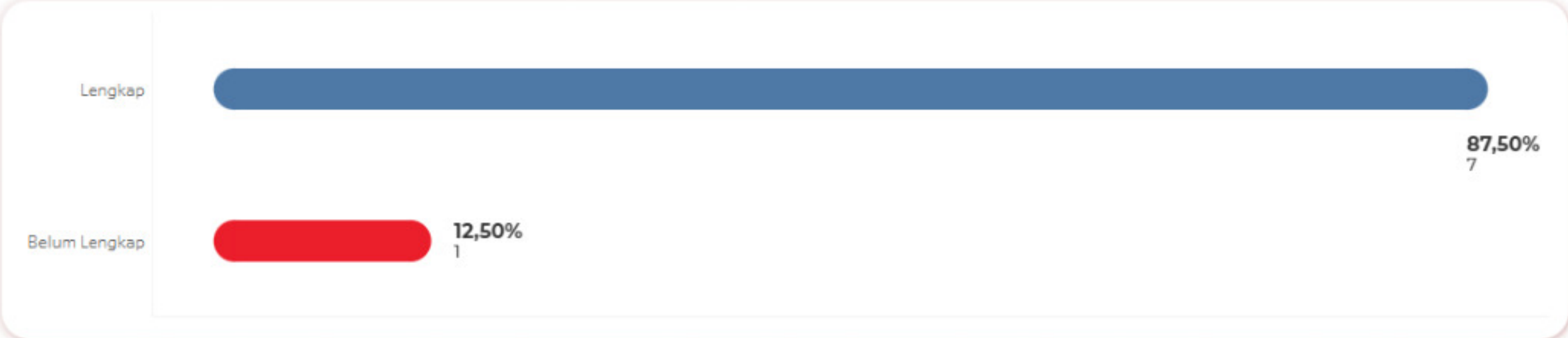
Belum Lapor

Kepatuhan



Kepatuhan dihitung dari jumlah status **pelaporan LHKPN Lengkap** dibagi seluruh Wajib Lapor

Status Pelaporan LHKPN



No.	Nama Instansi	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Antrian	Belum Lengkap	Lengkap	Pelaporan (%)	Kepatuhan (%)
1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8	8	0	0	1	7	100,00%	87,50%